

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pariwisata

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 Pariwisata secara umum dapat diartikan Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.

Menurut Alister dan Geoffrey (1982) Pariwisata merupakan serangkaian aktivitas yang berupa aktivitas perpindahan orang untuk sementara waktu ke suatu tujuan di luar tempat tinggal maupun tempat kerjanya, aktivitas yang dilakukannya selama tinggal di tempat tujuan tersebut dan kemudahan-kemudahan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhannya baik selama dalam perjalanan maupun di lokasi tujuannya.

Yoeti (1996) menjelaskan bahwa pariwisata merupakan suatu aktivitas manusia yang dilakukan secara sadar yang mendapat pelayanan secara bergantian diantara orang-orang dalam suatu negara itu sendiri atau di luar negeri (meliputi pendiaman orang-orang dari daerah lain) untuk mencari kepuasan yang beraneka ragam dan berbeda dengan apa yang dialaminya dimana ia memperoleh pekerjaan tetap.

Menurut Pitana dan Gayatri (2005) wisata sebagai daerah tujuan wisata (destinasi) harus menyediakan berbagai kebutuhan yang diperlukan oleh wisatawan agar tujuan kunjungan seorang wisatawan dapat terpenuhi.

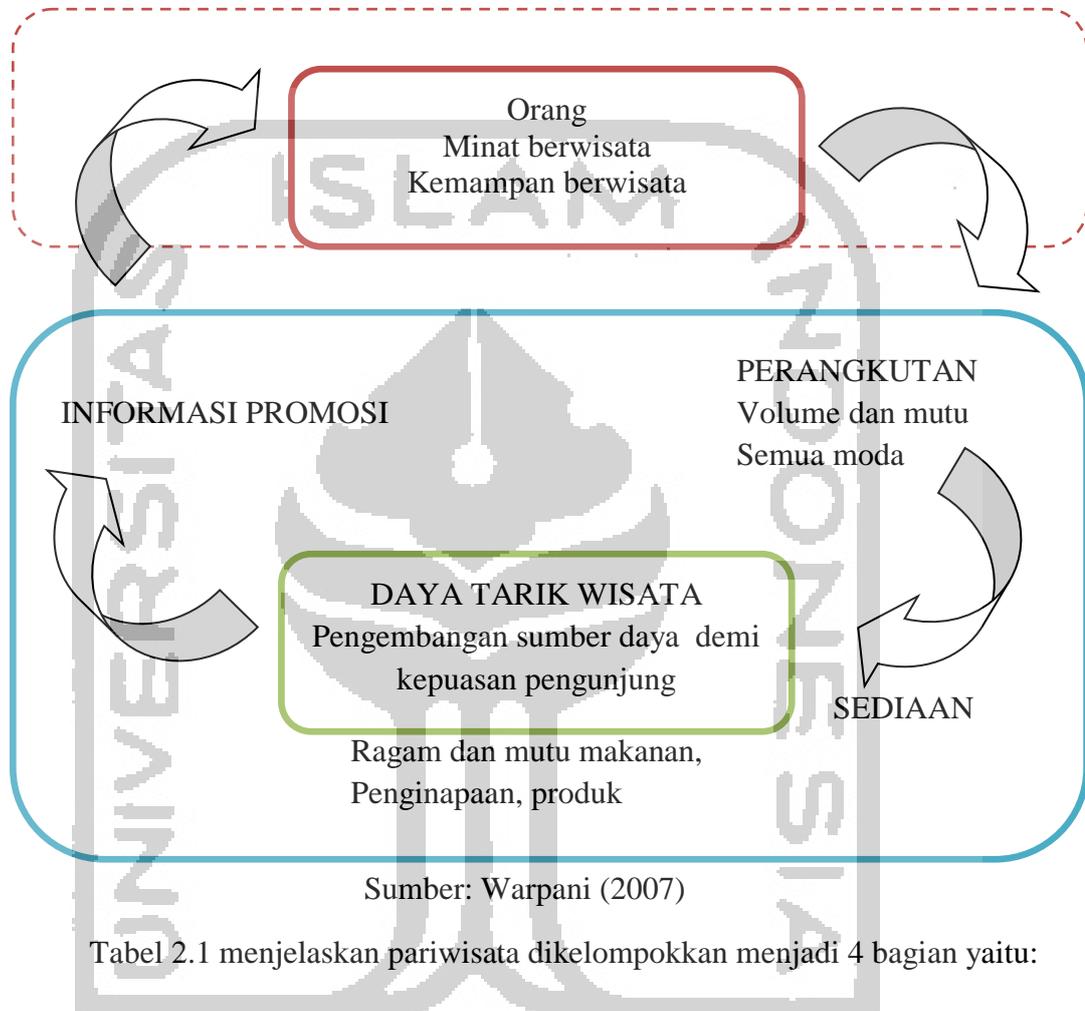
Menurut Institut of Tourism in Britain (sekarang Tourism Society in Britain) pada tahun 1976 (dalam buku Kusmayanti dan Endar Sugiarto 2000) menjelaskan pariwisata adalah kepergian orang-orang untuk sementara dalam jangka waktu pendek ke tempat-tempat tujuan di luar tempat tinggal dan tempat bekerja sehari-hari, serta kegiatan-kegiatan mereka selama beradani tempat-tempat tujuan tersebut; ini mencakup kepergian untuk berbagai maksud, termasuk kunjungan sehari atau darmawisata.

Menurut Kusmayanti dan Endar Sugiarto (2000) mengungkapkan bahwa pariwisata adalah gabungan gejala dan hubungan yang timbul dari interaksi wisatawan, bisnis pemerintah tuan rumah, serta masyarakat tuan rumah dalam proses menarik dan melayani wisatawan serta pengunjung lainnya.

Menurut Warpani (2007) memandang pariwisata sebagai suatu sistem dan memilahnya dalam sisi permintaan dan sediaan. Komponen permintaan terdiri atas elemen orang, ditengarai oleh hasrat orang melakukan perjalanan dan kemampuan melakukannya, sedangkan komponen sediaan adalah daya tarik wisata, serta perangkutan, informasi dan promosi serta pelayanan. Hubungan antar elemen digambarkan sebagai suatu sistem kepariwisataan.

Bagan 2.1

Sistem kepariwisataan : Model komponen fungsional kunci yang membentuk dinamika dan sistem hubungan kepariwisataan.



Tabel 2.1 menjelaskan pariwisata dikelompokkan menjadi 4 bagian yaitu:

- 1) Utama, daya tarik, yang mengandung arti objek yang menjadi sasaran dan destinasi kunjungan wisata. Bagian ini langsung menjadi pemicu dari pariwisata, dan penduduk baik sebagai pelaku, dan sebagai tuan rumah pariwisata.
- 2) Perangkutan, yang merupakan prasyarat proses terjadinya kegiatan pariwisata.

- 3) Informasi dan promosi, yang menjadi penunjang pembanguna dan pendorong minat berwisata
- 4) Sarana pelayanan, bagian yang membuat proses kegiatan pariwisata menjadi lebih mudah nyaman, aman, dan menyenangkan.

2.2 Desa Wisata

Menurut PIR – Pariwisata Inti Rakyat (Undang-Undang Otonomi Daerah (UU. No. 22/99) desa wisata suatu kawasan pedesaan yang memancarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkan berbagai komponen kepariwisataan. Misalnya; atraksi, akomodasi, makanan-minuman, dan kebutuhan wisata lainnya.

UU No.6 tahun 2014 tentang Desa menjelaskan mengenai desa dan desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Simanungkalit et. al. (2019) berdasarkan tingkat perkembangannya, status desa dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Desa Tertinggal: desa yang belum memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) dalam aspek kebutuhan social, infrastruktur dasar, sarana dasar, pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan
- b. Desa Berkembang: desa yang telah memenuhi SPM namun secara pengelolaan belum menunjukkan keberlanjutan
- c. Desa Mandiri: desa yang telah memenuhi SPM dan secara kelembagaan telah memiliki keberlanjutan

Menurut UU no. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata menjelaskan bahwa Desa wisata memiliki pengertian yang lebih khusus dibanding pengertian desa. Desa wisata adalah suatu daerah tujuan wisata, disebut pula sebagai destinasi pariwisata, yang mengintegrasikan daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.

Menurut Simanungkalit et al. (2019) berdasarkan tingkat perkembangannya, desa wisata dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

- a. Desa Wisata Embrio: desa yang mempunyai potensi wisata yang dapat dikembangkan menjadi desa wisata dan sudah mulai ada gerakan masyarakat/desa untuk mengelolanya menjadi desa wisata
- b. Desa Wisata Berkembang: desa wisata embrio yang sudah dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa, sudah ada swadaya masyarakat/desa untuk pengelolaannya, sudah mulai melaksanakan promosi dan sudah ada wisatawan yang mulai tertarik untuk berkunjung

- c. Desa Wisata Maju: desa wisata yang sudah berkembang dengan adanya kunjungan wisatawan secara kontinu dan dikelola secara profesional dengan terbentuknya forum pengelola, seperti Koperasi/ Badan Usaha Milik Desa (BUMdes), selanjutnya disebut BUMdes, serta sudah mampu melakukan promosi dan pemasaran dengan baik.

Menurut Simanungkalit et, al. (2019) untuk dapat dikategorikan sebagai desa wisata harus memenuhi beberapa syarat utama sebagai berikut:

- a. Memiliki persyaratan sebagai sebuah destinasi pariwisata sebagaimana diatur dalam UU No. 10 tahun 2009;
- b. Kegiatan pariwisata berbasis pada sumber daya perdesaan;
- c. Kegiatan melibatkan partisipasi aktif wisatawan dalam kehidupan perdesaan;
- d. Lebih berorientasi pada kegiatan rekreasi luar ruang (*outdoor recreation*);
- e. Sebesar-besarnya mendayagunakan sumber daya manusia lokal;
- f. Memberikan penghargaan besar pada budaya dan kearifan lokal;
- g. Menyediakan akses yang memadai baik akses menuju ke destinasi lain maupun internal di dalam desa wisata itu sendiri; dan
- h. Memilikikomunitas yang peduli pada pariwisata.

2.3 Ekonomi Masyarakat

Ekonomi Masyarakat adalah sebuah perekonomian yang dimiliki oleh masyarakat kecil dan yang didominasi oleh sebagian bangsa Indonesia. Dalam mengembangkan perekonomian masyarakat yang berada pada wilayah objek

pariwisata khususnya desa wisata maka dalam sebuah sistem ekonomi harus ada campur tangan dari masyarakat sekitar. Meningkatkan perekonomian masyarakat berarti secara tidak langsung harus juga meningkatkan kemampuan masyarakat dengan mengembangkan dan mendominasi potensi yang ada, dengan kata lain mengikut sertakan masyarakat dalam semua proses yang terjadi pada desa wisata tersebut. Upaya penggerakan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi masyarakat ini pasti akan meningkatkan produktivitas masyarakat, sehingga dalam sumber daya alam maupun sumber daya manusia dapat digali dan dimanfaatkan.

Mubyarto (1997) menjelaskan pengembangan ekonomi rakyat dapat dilihat dari tiga segi yaitu:

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolak pemikirannya adalah pengenalan bahwa setiap manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan.
- b. Memperkuat potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat itu. Dalam pelaksanaan memperkuat potensi ekonomi masyarakat maka harus ada keselarasan taraf pendidikan dan kreatifitas masyarakat dalam mengembangkkn potensi yang dimiliki pada setiap manusia. Dan tak lupa harus adanya derajat kesehatan untuk menunjang masyarakat dapat mengembangkan potensi yang ada.
- c. Mengembangkan ekonomi masyarakat juga mengandung arti melindungi masyarakat dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak

seimbang, serta mencegah eksploitasi golongan ekonomi antara golongan kuat dan lemah.

2.4 Literasi Keuangan

Manurung (2009) menjelaskan literasi keuangan adalah seperangkat keterampilan dan pengetahuan yang memungkinkan seorang individu untuk membuat keputusan dan efektif dengan semua sumber daya keuangan mereka.

Menurut Chen dan Volpe (1998) menyatakan bahwa literasi keuangan terbagi menjadi empat aspek, yaitu:

- a. *General Personal Finance Knowledge* Pemahaman beberapa hal yang berkaitan dengan pengetahuan dasar tentang keuangan pribadi.
- b. *Savings and borrowing* (tabungan dan pinjaman), bagian ini meliputi pengetahuan yang berkaitan dengan tabungan dan pinjaman seperti penggunaan kartu kredit
- c. *Insurance (asuransi)*, bagian ini meliputi pengetahuan dasar asuransi, dan produk-produk asuransi seperti asuransi jiwa dan asuransi kendaraan bermotor, dan
- d. *Investment (investasi)*, bagian ini meliputi pengetahuan tentang suku bunga pasar, reksadana, dan risiko investasi.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, literasi keuangan didefinisikan sebagai rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan (*knowledge*), keyakinan (*competence*), keterampilan (*skill*) konsumen dan masyarakat luas

sehingga mereka mampu mengelola keuangan dengan lebih baik (Otoritas Jasa Keuangan, 2014).

2.4.1 Tingkatan Literasi Keuangan

Pelaksanaan Edukasi dalam rangka meningkatkan keuangan masyarakat sangat diperlukan karena berdasarkan survei yang dilakukan oleh OJK pada 2013, bahwa tingkat literasi keuangan penduduk Indonesia dibagi menjadi empat bagian, yakni:

- a. *Well literate* (21,84 %), yakni memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.
- b. *Sufficient literate* (75,69 %), memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan.
- c. *Less literate* (2,06 %), hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan.
- d. *Not literate* (0,41%), tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, serta tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

Literasi keuangan merupakan suatu hal yang penting dan harus dimiliki oleh setiap orang. Seseorang dengan literasi keuangan yang baik (*well literate*),

akan mampu melihat uang dengan sudut pandang yang berbeda dan memiliki kendali atas keuangan. Orang tersebut akan tahu apa yang harus dilakukan dengan uang yang sedang dimiliki, akan dimiliki dan bagaimana cara memanfaatkan uang agar dirinya tidak diperbudak oleh uang.

2.4.2 Aspek Literasi Keuangan

Menurut Nababan dan Sadalia (2012), literasi keuangan terbagi menjadi lima aspek pemahaman, yaitu:

- a. *Basic Personal Finance*. *Basic Personal Finance* mencakup berbagai pemahaman dasar seseorang dalam suatu sistem keuangan seperti perhitungan bunga sederhana, bunga majemuk, inflasi, *opportunity cost*, nilai waktu, likuiditas aset, dan lain-lain.
- b. *Money Management* (pengelolaan uang). *Money management* mempelajari bagaimana seorang individu mengelola uang pribadi mereka. Semakin banyak pemahaman mengenai *financial literacy* maka semakin baik pula individu tersebut mengelola uang pribadi mereka.
- c. *Credit and debt management*. Manajemen perkreditan adalah suatu rangkaian kegiatan dan komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lain secara sistematis dalam proses pengumpulan dan penyajian informasi perkreditan suatu bank.
- d. *Saving and investment*. Tabungan (*saving*) merupakan bagian dari pendapatan masyarakat yang tidak dipergunakan untuk kegiatan konsumsi, sedangkan bagian dari tabungan yang dipergunakan untuk kegiatan

ekonomi (menghasilkan barang dan jasa) yang menguntungkan disebut dengan investasi (*investment*).

- e. *Risk management*. Risiko adalah sesuatu yang muncul akibat adanya suatu ketidakpastian. Manajemen risiko bertujuan untuk mengelola risiko sehingga kerugian yang dialami dapat diminimalisir atau keuntungan yang akan diperoleh dapat dioptimalkan.

2.4.3 Indikator literasi keuangan

Menurut Oseifuah (2010), terdapat beberapa elemen kunci dari kemampuan dan pengetahuan literasi keuangan yang biasanya disebutkan dalam literatur, yaitu:

- a. Pengetahuan matematis dan pengetahuan standar seperti angka dasar dan kemampuan dalam memahami.
- b. Pemahaman keuangan mengenai sifat dasar dan bentuk uang, bagaimana uang digunakan dan konsekuensi dari keputusan konsumsi.
- c. Kompetensi keuangan seperti memahami ciri-ciri utama dari layanan dasar keuangan, sikap dalam menggunakan uang dan tabungan, memahami pencatatan keuangan dan menyadari pentingnya membaca dan memeliharanya.
- d. Sadar akan risiko-risiko yang berhubungan dengan produk keuangan, dan memahami hubungan antara risiko dan pendapatan.
- e. Tanggung jawab keuangan, yaitu kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat mengenai isu-isu keuangan, mengetahui hak dan tanggung

jawab konsumen, kemampuan, dan kepercayaan untuk mencari bantuan ketika sesuatu berjalan tidak semestinya.

2.4.4 Pengukuran Literasi Keuangan

Literasi keuangan dicerminkan oleh pengetahuan dan kemampuan seseorang secara kognitif mengenai keuangan. Menurut Remund (2010), terdapat empat hal yang paling umum dalam literasi keuangan, yaitu pengetahuan dan kemampuan mengenai penganggaran, tabungan, pinjaman dan investasi.

Menurut Kharchenko (2011), terdapat dua pendekatan untuk mengukur literasi keuangan:

a. *Self-assessment*

Menurut pendekatan pertama responden diminta untuk mengevaluasi kemampuan literasi mereka dengan memberikan informasi mengenai sikap mereka terhadap keputusan keuangan, pengetahuan, dan informasi. Pendekatan ini telah digunakan oleh Jappelli (2010) yang menunjukkan sebuah perbandingan internasional dari tingkat literasi pada 55 negara berdasarkan indikator literasi keuangan yang disediakan oleh IMD *World Competitive Yearbook* (WCY).

b. *Objective measures like test score*

Pendekatan kedua dalam mengukur literasi keuangan bergantung pada tes objektif yang menilai pengetahuan istilah keuangan dari responden, memahami berbagai konsep keuangan dan kemampuan untuk mengaplikasikan kemampuan numerik dalam keadaan khusus yang berhubungan dengan keuangan. Objektif tes telah ditemukan untuk

menilai pengetahuan keuangan responden dengan lebih baik daripada *self assessment* (OECD, 2005).

2.5 Penelitian Yang Relevan

Dalam hal ini penelitian terdahulu berguna untuk rujukan atau referensi sebagai alat untuk membantu penulisan dalam proses penyusunan penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu yang berguna untuk membantu proses penyusunan penelitian ini.

Pertama penelitian yang dilakukan Hermawan (2016) yaitu Dampak Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran Terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal. Hasil penelitian diketahui bahwa aktifitas pengembangan Desa Wisata Nglanggeran dinilai cukup baik, indikator utamanya adalah rata-rata kenaikan kunjungan wisatawan yang cukup besar dari tahun ke tahun. Kesiapan masyarakat lokal yang ditinjau dari tingkat pendidikan, pengetahuan, serta tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengembangan desa wisata menunjukkan bahwa masyarakat telah cukup siap menghadapi berbagai potensi dampak yang muncul.

Kedua Amalia et. al. (2018) dengan judul Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Serta Dampaknya Terhadap Perekonomian Warga di Desa Tulungrejo Kota Batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa atraksi wisata di Desa Tulungrejo sangat beragam, antara lain wisata alam, wisata buatan, wisata agro, wisata sejarah, dan wisata religi. Hampir seluruh masyarakat Desa Tulungrejo telah berpartisipasi dalam kegiatan wisata dan telah siap dalam industri pariwisata. Partisipasi masyarakat Desa Tulungrejo lebih dari satu bentuk

partisipasi. Pengembangan Desa Wisata Tulungrejo menciptakan kegiatan ekonomi yang lebih bagi masyarakat. Terciptanya lapangan pekerjaan baru, adanya tambahan pendapatan bagi petani, serta meningkatnya nilai buah apel.

Ketiga menurut Abdillah et. al. (2016) dengan judul Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Kehidupan Masyarakat Lokal di Kawasan Wisata (Studi Pada Masyarakat Sekitar Wisata Wendit, Kabupaten Malang). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan Taman Wisata Air Wendit berdampak kepada kehidupan masyarakat sekitar. Dampak tersebut berupa dampak sosial seperti meningkatnya keterampilan penduduk, transformasi mata pencaharian dan transformasi norma. Selain itu dampak budaya yang masih tetap dilestarikan, hal tersebut juga memberikan dampak ekonomi berupa penyerapan tenaga kerja, mendorong aktivitas berwirausaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar wisata Wendit.

Keempat penelitian dari Anisah dan Riswandi (2015) yaitu Pantai Lampuuk dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat. Kegiatan wisata yang berlangsung di Pantai Lampuuk memberikan dampak terhadap kesejahteraan pelaku usaha yang semakin membaik, baik diukur dari tingkat pendapatan, pendidikan, dan kesehatan. Pendapatan pelaku usaha di kawasan wisata Pantai Lampuuk mengalami peningkatan setelah terlibat dalam kegiatan wisata.

Kelima penelitian dari Sudarmayasa dan Nala (2019) Kerajinan Sarung Tenun Samarinda Di Kampung Tenun yang menjadi salah satu daya tarik wisata di Kota Samarinda ini, secara langsung maupun tidak langsung sudah mengubah kehidupan masyarakat pemilik destinasi kearah yang lebih baik. Dari kehidupan

perekonimian, dampak yang dirasakan para pengerajin Sarung Tenun di Wilayah Kampung Tenun sangat berdampak signifikan semenjak dijadikannya wilayah mereka menjadi destinasi dan daya tarik wisata, yang bukan hanya wisatawan domestik, namun juga wisatawan mancanegara. Hal ini sudah dibuktikan dengan semakin banyaknya keluarga para pengerajin yang menempuh pendidikan tinggi dan memiliki kehidupan yang layak.

